

UPAYA DIPLOMASI INDONESIA TERHADAP AUSTRALIA UNTUK MENANGGAPI KEBIJAKAN *TOBACCO PLAIN PACKAGING ACT 2011* PERIODE 2012 – 2017.

ABSTRAK

Industri pengolahan tembakau merupakan salah satu industri yang memberikan kontribusi signifikan bagi penerimaan negara dimana pada tahun 2012 lalu mendapat tantangan dengan diberlakukannya *Tobacco Plain Packaging Act 2011* sebagai usahanya untuk menekan tingkat permintaan produk hasil tembakau. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis upaya diplomasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia terhadap Australia untuk menanggapi kebijakan *Tobacco Plain Packaging*. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengambilan data menggunakan studi literatur. Teori utama yang dipergunakan adalah diplomasi ekonomi dan model diplomasi ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya diplomasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dilatarbelakangi oleh adanya kepentingan nasional Indonesia terkait industri pengolahan tembakau yang memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan negara. Upaya diplomasi yang dilakukan pemerintah Indonesia adalah diplomasi ekonomi dengan mengoptimalkan forum bilateral. Model diplomasi ekonomi yang dikembangkan masih dikategorikan sebagai tipe tradisonal dimana kementerian perdagangan berfungsi sebagai ujung tombak utama diplomasi ekonomi Indonesia dan belum berjalan efektif dikarenakan masih diwarnai dengan kuatnya ego sektoral dan lemahnya koordinasi antar instansi pemerintah yang ditandai dengan adanya perbedaan sikap antara kementerian kesehatan dan kementrian perdagangan terkait dengan FCTC yang justru dapat melemahkan proses diplomasi ekonomi yang dijalankan pemerintah terkait *Tobacco Plain Packaging Act 2011*. Upaya diplomasi ekonomi melalui forum bilateral gagal, akhirnya pemerintah Indonesia mengambil langkah hukum dengan mengajukan *dispute settlement* ke WTO. Upaya ini juga tidak berjalan efektif dikarenakan tidak dibangunnya counter narasi untuk melawan penelitian ilmiah yang telah dilakukan Australia bahwa dengan *plain packaging* akan lebih efektif mengurangi jumlah permintaan terhadap rokok.

Kata kunci: diplomasi, diplomasi ekonomi, kemasan polos, sengketa dagang, WTO.

**INDONESIA'S DIPLOMACY EFFORTS ON AUSTRALIA TO
RESPONSE TOBACCO PLAIN PACKAGING ACT 2011 POLICY
PERIOD 2012 – 2017.**

ABSTRACT

Tobacco processing industry is one of industry that contributes significantly to state revenues where in 2012 it was challenged by Tobacco Plain Packaging Act 2011 enactment as an effort to reduce tobacco products demand. The purpose of this study was to analyze Indonesian government diplomacy efforts on Australia to response Tobacco Plain Packaging policy. Qualitative approach is used as a research method. Data collection techniques use literature studies. Economic diplomacy and economic diplomacy models are used as a main theory. The results showed that Indonesian government diplomacy efforts were motivated by the Indonesia's national interests in the tobacco processing industry which contributed significantly to state revenues. The diplomacy efforts carried out by the Indonesian government are economic diplomacy by optimizing bilateral forums. Economic diplomacy model that has been developed were still categorized as a traditional type where the ministry of trade functions as the main spearhead of Indonesian economic diplomacy and has not been effective because it's still characterized by strong sectoral ego and weak coordination among agencies which are marked by differences in attitude between the ministry of health and ministries of trade related to the FCTC which can actually weaken the government's economic diplomacy process related to Tobacco Plain Packaging Act 2011. Economic diplomacy efforts through bilateral forums failed, finally the government took legal steps to submit dispute settlement to WTO. This effort isn't effective also because there is no counter narrative to fight against scientific research conducted by Australia that with plain packaging will be more effective in reducing the number of cigarettes demands.

Keywords: diplomacy, economic diplomacy, plain packaging, trade disputes, WTO.